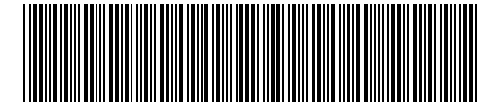




**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2017
NOMOR : SP DIPA- 022.01.1.901274/2017**



DS:9001-0997-1802-6708

Revisi ke 03

Tanggal : 30 Oktober 2017

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 18 Tahun 2016 tentang APBN TA 2017.

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

- | | | |
|-------------------------------|------------|---|
| 1. Kementerian Negara/Lembaga | : (022) | KEMENTERIAN PERHUBUNGAN |
| 2. Unit Organisasi | : (01) | SEKRETARIAT JENDERAL |
| 3. Provinsi | : (01) | DKI JAKARTA |
| 4. Kode>Nama Satker | : (901274) | KANTOR KOMITE NASIONAL KESELAMATAN TRANSPORTASI |
| Sebesar | : Rp. | 33.321.670.000 (TIGA PULUH TIGA MILIAR TIGA RATUS DUA PULUH SATU JUTA ENAM RATUS TUJUH PULUH RIBU RUPIAH) |

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

04 EKONOMI

04.08 TRANSPORTASI

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

022.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Perhubungan

022.01.01.1937 Pelayanan Pemeriksaan Lanjutan Kecelakaan Moda Transportasi

	Jumlah Uang
Rp.	33.321.670.000
Rp.	33.321.670.000

C. Sumber Dana Berasal Dari :

- | | | | | | |
|-------------------------------|-----|----------------|--------------------------------|-----|---|
| 1. Rupiah Murni | Rp. | 33.321.670.000 | 4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| 2. PNBP | | | - Pinjaman Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| PNBP TA Berjalan | Rp. | 0 | - Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| | | | 5. Hibah Langsung | Rp. | 0 |
| 3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri | Rp. | 0 | - Hibah Luar Negeri Langsung | Rp. | 0 |
| - Pinjaman Luar Negeri | Rp. | 0 | - Hibah Dalam Negeri Langsung | Rp. | 0 |
| - Hibah Luar Negeri | Rp. | 0 | 6. SBSN PBS | Rp. | 0 |

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

- | | | |
|--------------------|-----------|----------------|
| 1. KPPN JAKARTA IV | (133) Rp. | 33.321.670.000 |
|--------------------|-----------|----------------|

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan(Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017.

A.N MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
ASKOLANI
NIP. 196606111992021001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2017
NOMOR : DIPA- 022.01.1.901274/2017
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:9001-0997-1802-6708

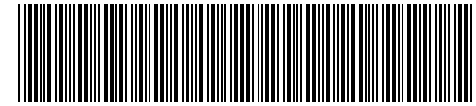
Kementerian Negara/Lembaga : (022) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Unit Organisasi : (01) SEKRETARIAT JENDERAL
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (901274) KANTOR KOMITE NASIONAL KESELAMATAN TRANSPORTASI

Kuasa Pengguna Anggaran : ACA MULYANA, SH., MH.
Bendahara Pengeluaran : SUKRIYADI, SE.
Pejabat Penanda Tangan SPM : NYAMINO, SE., MA.

Halaman : I A. 1

1 Fungsi	04	EKONOMI	33.321.670.000
Sub Fungsi	04.08	TRANSPORTASI	33.321.670.000
2 Program	022.01.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Perhubungan	33.321.670.000
Hasil (Outcome)	01	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan melalui tersedianya Dokumen Perencanaan, Pemrograman, Kebijakan Pentarifan, dan dokumen Analisa dan Evaluasi sebagai acuan dalam penyelenggaraan perhubungan.	
	02	Terwujudnya Pengelolaan SDM Aparatur Perhubungan yang berintegritas, netral, capable, profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera serta beretika	
	03	Terwujudnya Organisasi yang Tepat Fungsi dan Tepat Sasaran melalui sistem, proses dan tata laksana yang rasional, jelas, efektif, efisien, terukur, dan sesuai dengan visi Reformasi Birokrasi	
	04	Terwujudnya Laporan Keuangan Kementerian Perhubungan dengan penilaian opini WTP	
	05	Peningkatan Kerjasama Luar Negeri Sektor Transportasi dalam Kerangka Regional, Bilateral dan Multilateral	
	06	Peningkatan penetapan dan kualitas regulasi dalam implementasi kebijakan sektor transportasi	
	07	Peningkatan dalam pelayanan dan penyelesaian masalah hukum	
	08	Peningkatan kinerja layanan administrasi serta sarana dan prasarana di lingkungan Kantor Pusat Kementerian Perhubungan	
	09	Terselenggaranya Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi di Kementerian Perhubungan	
	10	Terwujudnya kebijakan dan strategi bidang kemitraan, pelayanan jasa dan lingkungan hidup sektor transportasi	
	11	Terwujudnya Komunikasi dan Pelayanan Informasi sektor transportasi kepada publik yang didukung SDM aparatur perhubungan dengan kompetensi kehumasan untuk meningkatkan citra positif Kementerian Perhubungan	
	12	Terselenggaranya persidangan Pemeriksaan Lanjutan Kecelakaan Kapal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	
	13	Peningkatan kinerja pelaksanaan investigasi kecelakaan transportasi	
IKU Program	01	Nilai akuntabilitas kinerja Kementerian Perhubungan berdasarkan hasil evaluasi Kemenpan dan Reformasi Birokrasi	
	02	Nilai akuntabilitas kinerja Sekretariat Jenderal berdasarkan hasil evaluasi Inspektorat Jenderal	
	03	Jumlah aparatur Kementerian Perhubungan yang ditingkatkan kualitas dan kompetensinya	
	04	Tersusunnya dokumen kebijakan terkait SDM aparatur di lingkungan Kementerian Perhubungan	
	05	Penataan organisasi/ kelembagaan dan tata laksana di lingkungan Kementerian Perhubungan	
	06	Opini BPK atas pengelolaan keuangan Kementerian Perhubungan	
	07	Jumlah aset BMN/Kekayaan Negara Sekretariat Jenderal yang terinventarisasi	
	08	Tingkat penyerapan anggaran di lingkungan Sekretariat Jenderal	

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2017
NOMOR : DIPA- 022.01.1.901274/2017
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:9001-0997-1802-6708

Kementerian Negara/Lembaga : (022) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Unit Organisasi : (01) SEKRETARIAT JENDERAL
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (901274) KANTOR KOMITE NASIONAL KESELAMATAN TRANSPORTASI

Kuasa Pengguna Anggaran : ACA MULYANA, SH., MH.
Bendahara Pengeluaran : SUKRIYADI, SE.
Pejabat Penanda Tangan SPM : NYAMINO, SE., MA.

Halaman : I A. 2

IKU Program	09	Jumlah MoU/Agreement Kerjasama Luar Negeri Sektor Transportasi dalam kerangka Regional, Bilateral dan Multilateral	
	10	Jumlah peraturan perundang-undangan di sektor transportasi	
	11	Jumlah peraturan perundang-undangan terkait pelaksanaan tugas Sekretariat Jenderal	
	12	Persentase penyelesaian perkara hukum	
	13	Tingkat ketepatan waktu pelayanan administrasi perkantoran	
	14	Penghematan konsumsi listrik, air dan biaya telepon di lingkungan kantor pusat Kementerian Perhubungan	
	15	Tingkat kecukupan sarana dan prasarana kantor pusat Kementerian Perhubungan	
	16	Jumlah pengunjung museum transportasi	
	17	Persentase Keandalan Sistem Informasi	
	18	Jumlah Sistem Aplikasi yang dibangun, dikembangkan, diintegrasikan dan dipelihara	
	19	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Tata Kelola TIK	
	20	Jumlah Laporan Pengelolaan Data dan Layanan Operasional TIK	
	21	Jumlah kajian yang menjadi rekomendasi kebijakan sektor transportasi	
	22	Jumlah unit pelayanan publik sektor transportasi yang dinilai dan dievaluasi telah memenuhi standar kriteria pelayanan prima	
	23	Keterbukaan Informasi Publik	
	24	Jumlah dokumen rekomendasi hasil analisis informasi untuk penyempurnaan kebijakan sektor transportasi	
	25	Jumlah perkara kecelakaan kapal yang ditindaklanjuti, disidangkan dan diputus tepat waktu	
	26	Prosentase rekomendasi putusan Mahkamah Pelayaran yang ditindaklanjuti	
	27	Ketepatan waktu pelaksanaan investigasi kecelakaan sampai dengan penyusunan laporan final/akhir	
Kegiatan	1937	Pelayanan Pemeriksaan Lanjutan Kecelakaan Moda Transportasi	33.321.670.000
Indikator Kinerja Kegiatan	001	Persentase ketepatan waktu pelaksanaan investigasi kecelakaan transportasi sampai dengan penyelesaian laporan final/akhir	
	002	Jumlah dokumen perencanaan, keuangan dan pengelolaan BMN, kepegawaian dan umum, pelayanan investigasi, pelayanan kerjasama serta pengelolaan data, informasi dan hubungan masyarakat	
	003	Jumlah peralatan pendukung kegiatan investigasi kecelakaan transportasi serta peralatan perkantoran	

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2017
NOMOR : DIPA- 022.01.1.901274/2017
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:9001-0997-1802-6708

Kementerian Negara/Lembaga : (022) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Unit Organisasi : (01) SEKRETARIAT JENDERAL
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (901274) KANTOR KOMITE NASIONAL KESELAMATAN TRANSPORTASI

Kuasa Pengguna Anggaran : ACA MULYANA, SH., MH.
Bendahara Pengeluaran : SUKRIYADI, SE.
Pejabat Penanda Tangan SPM : NYAMINO, SE., MA.

Halaman : I A. 3

Keluaran (Output)	1937.001	Layanan Investigasi	7,00 Paket	8.919.779.000
	1937.950	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	7,00 Layanan	4.223.207.000
	1937.951	Layanan Internal (Overhead)	22,00 Paket	2.758.066.000
	1937.994	Layanan Perkantoran	12,00 Bulan	17.420.618.000

SEKRETARIS JENDERAL

ttd.

Ir. SUGIHARDJO, M. Si
NIP 196102241992031001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2017
NOMOR : DIPA- 022.01.1.901274/2017
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:9001-0997-1802-6708

Kementerian Negara/Lembaga : (022) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Unit Organisasi : (01) SEKRETARIAT JENDERAL
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (901274) KANTOR KOMITE NASIONAL KESELAMATAN TRANSPORTASI
Kewenangan : (KP)

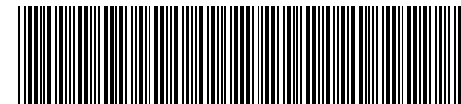
Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
901274	KANTOR KOMITE NASIONAL KESELAMATAN TRANSPORTASI	-	32.794.749	526.921	-	-	33.321.670		
022.01.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Perhubungan	-	32.794.749	526.921	-	-	33.321.670		
1937	Pelayanan Pemeriksaan Lanjutan Kecelakaan Moda Transportasi	-	32.794.749	526.921	-	-	33.321.670		
1937.001	Layanan Investigasi	-	8.919.779	-	-	-	8.919.779	01 . 51	
01	RM	-	8.919.779	-	-	-	8.919.779	133	
1937.950	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	-	4.223.207	-	-	-	4.223.207	01 . 51	
01	RM	-	4.223.207	-	-	-	4.223.207	133	
1937.951	Layanan Internal (Overhead)	-	2.231.145	526.921	-	-	2.758.066	01 . 51	
01	RM	-	2.231.145	526.921	-	-	2.758.066	133	
1937.994	Layanan Perkantoran	-	17.420.618	-	-	-	17.420.618	01 . 51	
01	RM	-	17.420.618	-	-	-	17.420.618	133	
JUMLAH		-	32.794.749	526.921	-	-	33.321.670		

SEKRETARIS JENDERAL

ttd.
Ir. SUGIHARDJO, M. Si
NIP 196102241992031001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2017
NOMOR : DIPA- 022.01.1.901274/2017
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**



DS:9001-0997-1802-6708

Kementerian Negara/Lembaga : (022) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Unit Organisasi : (01) SEKRETARIAT JENDERAL
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (901274) KANTOR KOMITE NASIONAL KESELAMATAN TRANSPORTASI

Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	901274	KANTOR KOMITE NASIONAL KESELAMATAN TRANSPORTASI													
		RENCANA PENARIKAN DANA	0	1.492.640	1.612.648	1.877.977	2.865.284	2.480.701	2.208.485	3.682.571	4.033.074	4.124.334	4.561.482	4.382.474	33.321.670
		52 BELANJA BARANG	0	1.492.640	1.420.984	1.877.977	2.817.284	2.283.944	2.208.485	3.682.571	3.992.574	4.074.334	4.561.482	4.382.474	32.794.749
		53 BELANJA MODAL	0	0	191.664	0	48.000	196.757	0	0	40.500	50.000	0	0	526.921
	022.01.01.1937	Pelayanan Pemeriksaan Lanjutan Kecelakaan Moda Transportasi	0	1.492.640	1.612.648	1.877.977	2.865.284	2.480.701	2.208.485	3.682.571	4.033.074	4.124.334	4.561.482	4.382.474	33.321.670
		52 BELANJA BARANG	0	1.492.640	1.420.984	1.877.977	2.817.284	2.283.944	2.208.485	3.682.571	3.992.574	4.074.334	4.561.482	4.382.474	32.794.749
		53 BELANJA MODAL	0	0	191.664	0	48.000	196.757	0	0	40.500	50.000	0	0	526.921

SEKRETARIS JENDERAL

ttd.

Ir. SUGIHARDJO, M. Si
NIP 196102241992031001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2017
NOMOR : DIPA- 022.01.1.901274/2017
IV. C A T A T A N**



DS:9001-0997-1802-6708

Kementerian Negara/Lembaga : [022] KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Unit Organisasi : [01] SEKRETARIAT JENDERAL
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker : [901274] KANTOR KOMITE NASIONAL KESELAMATAN TRANSPORTASI

Halaman : IV. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

SEKRETARIS JENDERAL

ttd.
Ir. SUGIHARDJO, M. Si
NIP 196102241992031001